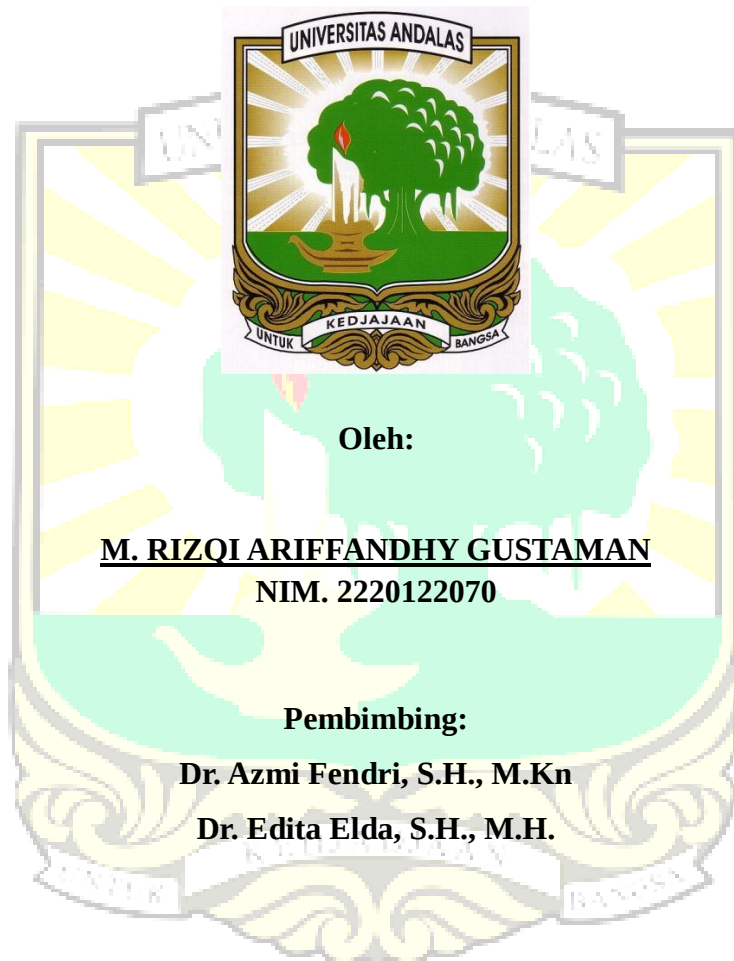


**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

TESIS

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas***



Oleh:

M. RIZQI ARIFFANDHY GUSTAMAN
NIM. 2220122070

Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
Dr. Edita Elda, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**M. Rizqi Ariffandhy Gustaman, 2220122070, Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 120 Halaman, Tahun 2025**

ABSTRAK

Kasus pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (11) mengatakan mediasi adalah cara penyelesaian kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya dan / mediator pertanahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini *Pertama* Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Indragiri Hilir?, *Kedua* Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan peraturan menteri ATR/BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, *Ketiga* Apa sajakah kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif analisis jenis penelitian primer, lokasi penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penyebab timbulnya sengketa tanah di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, tanah tetap, nilai ekonomis dan tingginya angka kemiskinan. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Indragiri Hilir adalah pra mediasi dan agenda mediasi sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan , adapun kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah yakni itikad baik pihak yang bersengketa, menolak kesepakatan damai, serta upaya untuk mengatasi kendala yang timbul yakni melakukan mediasi, sosialisasi, transformasi digital.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Mediasi, Kantor Pertanahan, Indragiri Hilir.

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES THROUGH MEDIATION AT THE LAND OFFICE OF INDRAGIRI HILIR REGENCY

M. Rizqi Ariffandhy Gustaman, 2220122070, Notary Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 120 Pages, Year 2025

ABSTRACT

Land disputes are a form of interaction between two (or more) individuals or groups, each asserting their interests over the same object—namely land and other matters related to land, such as water, plants, minerals, and the air above the land in question. According to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases, Article 1 paragraph (11), mediation is defined as a method of resolving cases through a negotiation process to reach an agreement, facilitated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, the Land Office according to its authority, and/or land case mediators. This study addresses the following research questions: First, what are the causes of land disputes in Indragiri Hilir Regency? Second, how is the process of resolving land disputes through mediation carried out in Indragiri Hilir Regency based on Ministerial Regulation ATR/BPN Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases? Third, what are the obstacles and efforts in resolving land disputes through mediation at the Land Office of Indragiri Hilir Regency? The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach, utilizing primary data. The research was conducted at the Land Office of Indragiri Hilir Regency. The causes of land disputes in Indragiri Hilir Regency include lack of responsiveness and transparency of information in the community, fixed land status, economic value of the land, and a high poverty rate. The mechanism for resolving land disputes in Indragiri Hilir Regency includes pre-mediation and mediation agendas in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020. The main obstacles in resolving land disputes include the absence of good faith from the disputing parties and rejection of peaceful agreements. Efforts to overcome these obstacles involve conducting mediation, public outreach, and digital transformation.

Keywords: Land Dispute, Mediation, Land Office, Indragiri Hilir.